



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1357 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.

Y

- KESATU : Menetapkan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Indikator Ekonomi Makro dan Sosial	Proyeksi 2014
(1)	(2)	(3)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,5-6,9%
2.	Tingkat Inflasi	4,5-5,5%
3.	PDRB Harga Berlaku	Rp 1.485,00 triliun
4.	PDRB Harga Konstan Tahun 2000	Rp 505,42 triliun
5.	Produktivitas Sektoral	
	a. Pertanian	Rp 34,84 juta
	b. Pertambangan	Rp 376,68 juta
	c. Industri Pengolahan	Rp 258,91 juta
	d. Listrik, Gas dan Air Bersih	Rp 968,23 juta
	e. Konstruksi	Rp 785,12 juta
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	Rp 153,78 juta
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	Rp 272,45 juta
	h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Rp 978,89 juta
	i. Jasa-jasa	Rp 102,65 juta
6.	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran	
	a. Konsumsi Rumah Tangga	57,2%
	b. Konsumsi Pemerintah	9,9%
	c. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,9%
	d. Ekspor	55,2%
	e. Impor	60,2%
7.	PDRB Per Kapita	Rp 144,17 juta
8.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,19%
9.	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB	2,66%
10.	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	1,19%
11.	APBD	Rp 72,00 triliun

Y
*

No	Indikator Ekonomi Makro dan Sosial	Proyeksi 2014
(1)	(2)	(3)
12.	ICOR	5,4
13.	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp 11,9 triliun
14.	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	2.6%
15.	Ekspor	
	a. Melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	48.529 juta Dollar AS
	b. Produk asal DKI Jakarta	12.372 juta Dollar AS
16.	Impor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	99.979,8 juta Dollar AS
17.	Jumlah Wisman	2,45 juta orang
18.	Jumlah Penduduk	10,2 juta orang
19.	Kepadatan Penduduk	15.402 penduduk/km ²
20.	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,50 per wanita kawin
21.	Jumlah Angkatan Kerja	5,21 juta orang
22.	Jumlah Penduduk Bekerja	4,71 juta orang
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82%
24.	Jumlah Penduduk Miskin	351,18 ribu orang
25.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,47%
26.	Indeks Pembangunan Manusia	79,1
27.	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	- SD	111,2
	- SMP	112,2
	- SMA dan SMK	92,5



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

PENETAPAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN

: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
: 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota	1. Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	18.403 m2
2.	Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal	1. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN : 11,38 Triliun PMA : 52,09 Triliun
		2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN : 94 proyek PMA : 1.298 proyek
3.	Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik	1. Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun	75 titik
4.	Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota	1. Jumlah SPBG	15 SPBG
5.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1. Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli	100%
		2. Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai	40%
6.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	1. Panjang Lintasan Busway	247,36 km
		2. Jumlah penumpang busway	500.000 orang/hari
		3. Headway busway rata-rata	12 menit
7.	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota	1. Luas jalan yang terbangun	48.893.529,08 m2
		2. Jumlah jembatan yang terbangun	290 jembatan
		3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik	97.05%

Y A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	1. Jumlah sumur resapan (Injection Well) waduk yang terbangun	4 sumur resapan
		2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor	0
		3. Panjang pengaman pantai yang terbangun	1.100 meter
9.	Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal	1. Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat	Inventarisasi lahan IPAL dan Penyusunan UKL-UPL IPAL Zona 1
10.	Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota	1. Cakupan pelayanan air minum perpipaan	58.00%
11.	Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman	1. Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	93%
		2. Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	14%
12.	Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta	1. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari bussiness as usual (BAU) dengan baseline emisi GRK tahun 2005	5%
		2. Persentase status mutu air tercemar berat di:	
		- sungai	63%
		- situ/waduk	35.50%
		- air tanah	10%
- laut/teluk	30%		
13.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim	1. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang kompeten dan terampil	3.500 orang
		2. Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana	60 organisasi
14.	Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	1. Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi	15% dari 8000 unit (1.209 unit hunian)
15.	Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung)	1. Jumlah RW Kumuh yang tertata	70 RW
16.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta	1. Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas daratan	4.20%
		2. Rasio ruang terbuka biru terhadap luas perairan di darat	3.10%
		3. Jumlah lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik	14 lokasi taman

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas	1. Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan	21 Event
18.	Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta	1. Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu	21 Pusat Kebudayaan
19.	Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota	1. Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi	3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya
20.	Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)	1. Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat	19 konflik
		2. Indeks demokrasi	78
21.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	1. Jumlah lokasi rawan ketertiban umum	21 lokasi
22.	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	1. Indeks efektifitas pemerintahan	0.2
23.	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kompetensinya	1. Terpenuhinya SDM aparatur melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan	2.000 orang
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP
25.	Pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu	1. Integritas pelayanan publik	8.2
26.	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	2. Sistem pelayanan perizinan terpadu secara online	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perizinan Terpadu 3) 5.809 Pemohon 4) Tingkat kepuasan 87,84%
		3. Sistem pelayanan pajak online (non kendaraan bermotor)	11.718 Wajib Pajak
27.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	1. Angka Melek Huruf	99.60%
		2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,40 tahun
28.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	50 ibu per 100.000 kelahiran hidup
		2. Angka Kematian Bayi	7,4 bayi per 1.000 kelahiran hidup
		3. Angka Usia Harapan Hidup	76,50 tahun

AY

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan pelayanan KB	1. Total Fertility Rate	2,3

Jumlah APBD Tahun 2014 : Rp 72.000.134.943.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2014 : Rp 64.882.747.143.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 : Rp 49.006.125.408.118,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO